TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS *NON-SELF INCRIMINATION* TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Oleh: Febri Nolin Simanjuntak
Pembimbing 1: Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH
Pembimbing 2: Erdiansyah, SH.,MH
Alamat: Jalan Kelayau
Email: febrinolin123@gmail.com / Telepon : 0821 2241 5744

ABSTRACT

In criminal procedural law, witnesses can be divided into several forms, one of which is a crown witness or a crown witness. The crown witness is a witness originating from or taken from one of the other suspects or defendants who jointly committed a criminal act in the event that the witness was given a crown. Crown witnesses themselves are not regulated in detail in the Criminal Procedure Code. To be able to make a suspect or defendant as a crown witness must be carried out through the procedure of solving the case file which is the authority of the Public Prosecutor. The use of crown witnesses in uncovering a case still poses a problem, because the use of a crown witness is not in accordance with the system of evidence and the model of the criminal justice system in force in Indonesia.

The research entitled "The Application of the Principles of Non-Self Incrimination to Crown Witnesses in the Indonesian Criminal Procedure Code" aims to determine the application of the principle of non-self incrimination to crown witnesses and to describe the ideal arrangement for crown witnesses in Indonesian criminal procedure law.

This research is normative research or library research. In this study, the authors chose research on legal principles, namely the principle of non-self incrimination and comparison of law. The data used in this study is secondary data. Then the data is analyzed qualitatively. The theoretical foundation used is the theory of proof and the concept of the criminal justice system.

The results of the study indicate that the application of the principle of non-self incrimination to crown witnesses is not in accordance with the rules of law stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code. This can be proven by a system of evidence adopted in Indonesia, where many legal rules regarding the validity of an evidence in a criminal case are violated and there is a discrepancy between the existing criminal justice system model and the rules governing the crown witnesses.

Keywords : *Non-Self Incrimination Principle, Witness Mahkota, Indonesian Criminal Procedure Code.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berlakunya hukum acara pidana nasional sudah barang tentu akan banyak menimbulkan perubahan penting tidak hanya dalam proses peradilan pidana, melainkan juga perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia.¹

Berbicara mengenai perkembangan hukum acara pidana Indonesia, juga dapat dilihat dengan berlakunya asas *non-self incrimination* dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu pada saat Indonesia meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Rights* ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik.² Undang-undang tersebut menyatakan “seseorang tidak boleh dipaksa untuk bersaksi atas dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat pengaturan mengenai alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:³

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam hukum acara pidana, berbicara mengenai saksi, juga dikenal saksi mahkota atau *crown witness*.⁴ Saksi mahkota sendiri tidak diatur didalam hukum acara pidana Indonesia, namun pengertian saksi mahkota dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2012 yang menyatakan:

Walaupun tidak diberikan satu definisi otentik dalam kitab undang-undang hukum acara pidana mengenai saksi mahkota,

namun berdasarkan perspektif empiris, saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam hal mana saksi tersebut diberikan mahkota.

Pemberian mahkota sendiri bertujuan untuk menghilangkan segala tuntutan atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.⁵ Untuk dapat dijadikannya tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota dapat dilakukan dengan cara melakukan pemecahan berkas perkara atau *splitsing* oleh Penuntut Umum.⁶ Pemecahan berkas perkara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memuat syarat minimum dapat dilakukannya pemecahan berkas perkara.⁷

Di Indonesia sendiri, sudah banyak perkara yang melibatkan saksi mahkota dalam mengungkap suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang terjadi di Aceh Kabupaten Aceh Singkil. Dimana pada kasus ini ada delapan orang terdakwa yang didakwakan melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berkas para terdakwa di *split* oleh jaksa Penuntut Umum.⁸

Atas hasil putusan tersebut, maka para terdakwa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Para terdakwa bersama penasehat hukumnya dalam memori kasasinya memaparkan bahwa selama proses persidangan pada tingkat pertama dan banding, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang melanggar ketentuan yang berlaku diantaranya Hakim tidak mempertimbangkan penggunaan saksi mahkota sebagai bentuk pelanggaran asas *non-self incrimination* dan lain sebagainya. Pada amar putusan di tingkat Kasasi, Hakim menolak permohonan yang diajukan para

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 105.

⁶ Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2012 Tentang Kasus Pengerusakan Kantor Bupati Aceh Singkil.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 59.

² Pasal 14 Ayat (3) Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

³ Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 271.

pemohon kasasi sehingga para terdakwa tetap menjalani sisa masa hukumannya.⁹

Namun, menurut analisis penulis, terdapat sebuah masalah mengenai pengaturan saksi mahkota di Indonesia. Ada yang menganggap bahwa pengaturan saksi mahkota di Indonesia nyata-nyata melanggar asas *non-self incrimination*. Tetapi, ada pula yang berpandangan bahwa pengaturan saksi mahkota telah sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia. Atas perbedaan pendapat tersebut penulis tertarik mengkaji masalah pengaturan saksi mahkota di Indonesia.

Mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dibahas hingga contoh kasus terkait dengan permasalahan, penulis tertarik melakukan penelitian atas masalah ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Non-Self Incrimination Terhadap Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bagian latar belakang masalah, maka penulis hendak mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan saksi mahkota yang berlaku di Indonesia telah melanggar asas *non-self incrimination* ?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal terhadap saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan saksi mahkota yang berlaku di Indonesia telah melanggar asas *non-self incrimination* atau tidak.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal terhadap saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peneliti

maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian terhadap Penerapan Asas *non-self incrimination* terhadap Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁰ Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Erdianto Effendi bahwa hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil.¹¹ Subekti menyatakan bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹²

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya empat teori pembuktian, sebagai berikut:¹³

- a. Teori pembuktian secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*);
- b. Teori pembuktian *conviction intime*;
- c. Teori pembuktian *conviction raisonnee*;
- d. Teori pembuktian secara negatif.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara kedua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Namun, sistem ini mempunyai kelemahan tersendiri, dimana dalam sistem ini, keyakinan Hakim paling berperan dan

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2017, hlm. 227.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, hlm. 14.

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

⁹ *Ibid.*

dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan Hakim.¹⁴

2. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu sistem yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁵ Yesmil Anwar menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem penanganan perkara yang dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan putusan di Lembaga Perasyarakatan.¹⁶

Sistem peradilan pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan terdapat dua asas yang harus dihayati, diantaranya asas kelayakan dan asas kegunaan. Asas kelayakan sendiri didasari pada kepentingan masyarakat agar tertib hukum, sedangkan asas prioritas dapat dikaitkan dalam berbagai kategori tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.¹⁷

Due process model pada dasarnya menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Maksudnya adalah bahwa proses pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak ditekankan pada hasil yang maksimal serta efisiensi penyelesaian perkara seperti yang dianut oleh *crime control model*. Pada *due process model* lebih menekankan pada *presumption of innocence* atau praduga tak

bersalah, dimana asas praduga tak bersalah ini lebih bersifat normatif (*legal guilt*).¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Menurut kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *dibeliratif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Algra mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta mengenai apa yang menurut hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bagi suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi

¹⁴ *Ibid.* hlm. 280.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 14.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 33.

¹⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Pustaka Yustisia, Surabaya, 2012, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 80.

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²¹ *Ibid.*, hlm. 61.

penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²²

berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara.³⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²³
2. Yuridis adalah menurut hukum.²⁴
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya atau secara singkat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ringan.²⁵
4. Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dan berpendapat.²⁶
5. Asas *non-self incrimination* adalah asas yang menetapkan seseorang diduga terlebih dahulu melakukan kesalahan, untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan bukan dilakukan oleh Penuntut Umum, tetapi dilakukan oleh orang yang bersalah tersebut.²⁷
6. Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dalam hal mana saksi tersebut diberikan mahkota.²⁸
7. Pidana adalah siksaan, derita, nestapa.²⁹
8. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan dipengadilan yang

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Fokus penelitian hukum normatif ini membahas asas hukum dan perbandingan hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.³¹

2. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif menggunakan jenis data sekunder.³²

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode kajian pustaka yakni dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-

²² Jamal Abdullah, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. III, No. 1 Februari 2016, hlm. 5.

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1281.

²⁴ *Ibid.* hlm. 1320.

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 35.

²⁷ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 152.

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2116 K/Pid.Sus/2012 Tentang Pengerusakan Kantor Bupati Aceh Singkil.

²⁹ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 2.

³⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses, tanggal 16 Februari 2018.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 62.

³² *Ibid.*, hlm. 24.

faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan.³³

Biasanya hal tersebut sering diistilahkan dengan istilah *notoire feiten notorious* atau *generally known*. Mengenai hal tersebut, ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada keadaan yakni peristiwa yang diketahui secara umum bahwa peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya. Namun “hal yang secara umum diketahui” tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain.³⁴

2. Sistem Pembuktian

a. *Conviction-In Time*

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu, menempatkan fungsi Hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkara. Putusan Hakim semata-mata didasarkan pada keyakinan Hakim. Teori ini diterapkan pada sistem juri di Prancis yang menghasilkan putusan-putusan yang dinilai aneh.³⁵ Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan.

b. *Conviction-Rasione*

Dalam teori ini, Hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya. Namun,

tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh Hakim sendiri, tetapi keyakinan yang didasarkan dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan ketentuan pembuktian tertentu.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Keyakinan Hakim dalam sistem pembuktian ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah.³⁶

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan penggabungan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim semata. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.³⁷

3. Beban Pembuktian

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah Penuntut Umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa atau penasihat hukum (alat bukti yang meringankan). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara jelas menunjuk siapakah yang dibebani kewajiban pembuktian dalam perkara pidana.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang sebuah sistem. Dewey memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-

³³ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 257.

³⁴ *Ibid.* hlm. 223.

³⁵ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Surabaya, 2011, hlm. 39.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 245.

³⁷ *Ibid.* hlm. 262.

³⁸ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 15.

bagiannya. Pengertian-pengertian dasar yang terkandung didalam sistem adalah, bahwa sistem berorientasi pada tujuan; suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya.³⁹

2. Model-Model Sistem Peradilan Pidana

a. *Crime Control Model*

Crime control model menekankan pentingnya penegakan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan didasarkan pada pernyataan bahwa setiap kejahatan harus ditindak dan diproses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Perhatian utama pada model *crime control model* ditujukan kepada efisiensi, maksudnya ialah meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses suatu tindak pidana.⁴⁰

b. *Due Process Model*

Model ini pada dasarnya menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Maksudnya adalah bahwa proses pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak ditekankan pada hasil yang maksimal serta efisiensi penyelesaian perkara seperti yang dianut oleh *crime control model*. Pada *due process model* lebih menekankan pada *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah, dimana asas praduga tak bersalah ini lebih bersifat normatif (*legal guilt*).⁴¹

c. *Family Model*

Model ini pertama kali diperkenalkan oleh John Griffiths, dan disebut sebagai model kekeluargaan. Model ini dianut di negeri Belanda. Dimana dalam model ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak diberikan hukuman ataupun tidak dianggap sebagai orang jahat khusus (*special criminal people*) yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat, melainkan mereka tetap diperlakukan sebagai anggota

masyarakat dan tetap diberikan kasih sayang layaknya seperti anak yang melakukan kesalahan didalam keluarganya.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang yang dihadapkan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴³

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktiknya, banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian pada hukum.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Asas *Non-Self Incrimination*

Pembukaan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pasal 1 Ayat (3) menetapkan bahwa salah satu tujuan piagam tersebut adalah mewujudkan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan, dan dalam meningkatkan serta menjunjung tinggi penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.⁴⁵

³⁹ Tolib Effendi, *Op.cit*, hlm. 2.

⁴⁰ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.cit*, hlm. 72.

⁴¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Loc.cit*.

⁴² *Ibid*. hlm. 93.

⁴³ Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm. 230.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Makassar, 2014, hlm. 250.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan Asas *Non-Self Incrimination*

Tujuan dari hukum acara pidana dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut: "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti, bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut."⁴⁶

Saksi mahkota yang ada di Indonesia sebenarnya berasal dari prosedur pemecahan berkas perkara atau *splitsing*, yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

"Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah".

Menurut penulis, penggunaan saksi mahkota di Indonesia sebenarnya tidak melanggar asas *non self-incrimination*, karena asas *non-self incrimination* sendiri merupakan sebuah jaminan, yang diberikan oleh Pasal 14 Ayat (3) *International Covenant On Civil And Political Right* yang menyatakan agar seseorang yang menghadapi proses hukum tidak dianggap atau diperlakukan sebagai orang yang

bersalah sampai kesalahannya terbukti menurut hukum maka ketentuan tersebut memberikan beberapa jaminan kepada orang tersebut (tersangka atau terdakwa), salah satunya untuk tidak dipaksa bersaksi atas dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah. Itu artinya, ketentuan tersebut merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa bukan hak seorang saksi.

Pengaturan saksi mahkota di Indonesia juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan, kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif. Dimana penuntut umum dibebankan kewajiban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dalam hukum pembuktian dikenal yang namanya *bewijsvoering*.

Bewijsvoering sendiri berbicara tentang bagaimana memperoleh atau menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan prosedur pemecahan berkas perkara sehingga nantinya terdakwa dapat menjadi saksi untuk terdakwa yang lain. Artinya, penuntut umum dalam menghadirkan terdakwa sebagai saksi mahkota untuk memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa pidana, dibenarkan dalam hukum acara pidana Indonesia karena kitab undang-undang hukum acara pidana sendirilah yang memberikan kewenangan tersebut kepada penuntut umum.

Pengaturan pemecahan berkas perkara yang berlaku saat ini, juga memiliki kelemahan dalam hal ketidakpastian hukum, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2012 menyatakan saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam hal mana saksi tersebut diberikan mahkota. Pemberian mahkota ini bertujuan untuk menghilangkan segala tuntutan atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 8.

salah satu pelakunya atau dimaafkan atas kesalahannya.

Melihat dari tujuan diberikannya mahkota kepada saksi seharusnya saat seorang terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota, mendapat keringanan atau pengurangan hukuman dikarenakan dalam hal ini secara tidak langsung, terdakwa membantu penuntut umum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Namun yang terjadi tidaklah demikian, dalam kasus yang penulis angkat, para terdakwa tidak mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman saat terdakwa dijadikan sebagai saksi mahkota.

Pengaturan pemecahan berkas perkara yang berlaku di Indonesia juga memiliki kelemahan dari sisi keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota. Ada kemungkinan kesaksian yang diberikan oleh terdakwa dalam statusnya sebagai saksi mahkota, nantinya akan dijadikan dasar bagi penuntut umum dan hakim untuk bertanya kepada terdakwa dalam sidanganya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat terdakwa.

Jika keterangan yang diberikan dalam statusnya sebagai saksi mahkota bertolak belakang dengan keterangan yang dia berikan dalam statusnya sebagai terdakwa, maka saksi mahkota dapat dianggap memberikan keterangan palsu dan dapat diancam Pasal 242 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.

Keterangan terdakwa yang diberikan secara bebas seharusnya tidak dijadikan dasar atau patokan bagi penuntut umum dan hakim untuk bertanya kepada saksi mahkota. Menurut Eddie O.S Hiariej, keterangan terdakwa terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa disidang pengadilan, hal itu berlaku pada dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan orang lain.

B. Pengaturan Ideal Penggunaan Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Ideal merupakan suatu hal yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.⁴⁷ Sehingga diperlukan suatu konsep ideal suatu peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Pengaturan ideal penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia perlu mendapatkan rujukan dari berbagai negara untuk dijadikan sebagai referensi. Penulis dalam hal ini akan memberikan penjabaran dari beberapa negara asing.

1. Pengaturan Saksi Mahkota di Italia

Di Italia, penegak hukum dapat bekerjasama dengan pelaku tindak pidana. Jika kerjasama yang dilakukan berhasil, maka pelaku akan diberikan pengurangan hukuman. Kerjasama yang dilakukan berfokus pada kejahatan terorganisir (mafia), kejahatan terorisme, dan kejahatan penyanderaan dengan meminta tebusan.⁴⁸

Setiap kejahatan mempunyai syarat-syarat tersendiri untuk menjadi saksi mahkota, namun syarat utama agar pelaku tindak pidana dapat menjadi saksi mahkota adalah kerjasama yang dilakukan harus bertujuan untuk mencegah atau menggagalkan terjadinya suatu tindak pidana atau juga memberikan informasi yang dapat membantu perkembangan penyidikan.⁴⁹

Peraturan saksi mahkota pertama kali diterbitkan tahun 1979, hal ini dilakukan sebagai reaksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Brigade Rosse, Autonomia Operaia, serta Linea Prima terhadap salah seorang negarawan bernama Aldo Moro pada tahun 1978. Sebelum *Provvedimenti Urgenti in Tema di Lotta Alla Criminalita Organizzata e di Trasparenze e Buon Andamento*

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 946.

⁴⁸ Peter J.P Tak, Deal with Criminal: Supergrass, Crown Witness and Pentiti, *Westlaw Journal*, Harvard University Press, Volume 5, Nomor 1, 1997, hlm. 16.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 18.

Dell'attivita Amministrativa Bagian 8 Ayat 1 DL 152/1991 Tanggal 13 Maret 1991 berlaku, pemerintah Italia mengeluarkan *Decreto Legge* Nomor 625 Tanggal 15 Desember 1979 yang kemudian diubah menjadi *Misure Urgenti Per La Tutela Dell'ordine Democartico e Della Sicurezza Pubblica* Nomor 15 Tanggal 6 Februari 1980.⁵⁰

2. Pengaturan Saksi Mahkota di Amerika Serikat

Plea bargaining merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yang selalu terjadi dalam rangkaian penanganan perkara pidana. *Plea bargaining* sudah ada sejak abad ke-19, karena pada waktu itu pengadilan Amerika sangat memerlukan sistem ini untuk menangani banyak perkara.⁵¹

Plea bargaining yang diketahui sebagai praktik penanganan perkara pidana, dimana antara pihak Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum telah terjadi perundingan atau negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan kelak.⁵²

Plea bargaining disebut juga sebagai model prosedur *non-trial*, dimana dalam proses ini terdakwa tidak melalui peradilan juri (*trial*). Prosedur *non-trial* ini memiliki kelemahan serius. Khususnya, terdakwa tidak dapat memberikan pembelaan dan harus mengaku bersalah melakukan tindak pidana secara sukarela. Namun demikian, karena efisiensi, sistem tawar-menawar ini mendapat dukungan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dan dianggap sebagai sebuah komponen penting dari administrasi peradilan.⁵³

3. Pengaturan Saksi Mahkota Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai saksi mahkota. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil atau berasal dari salah seorang terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota.⁵⁴ Dengan demikian berdasarkan visi praktek peradilan, dasarnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut:⁵⁵

a. Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi

Dalam konteks ini berarti saksi mahkota adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

b. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah satu seorang tersangka atau terdakwa

Terdakwa adalah seorang yang karena keadaan atau perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada suatu tindak pidana dimana pelaku atau terdakwa lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantaranya terdakwa yang peranannya paling kecil.

c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota

Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan *kehormatan* berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya. Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota adalah terdakwa yang bergantian menjadi saksi atas perkara

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 20.

⁵¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.cit.*, hlm. 48.

⁵² *Ibid.* hlm. 50.

⁵³ John H. Lengbein, *Understanding the Short History of Plea Bargaining*, *Westlaw Journal*, Yale Law School, Volume 4, Nomor 2, 2009, hlm. 262.

⁵⁴ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mutfi dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 197.

⁵⁵ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 130.

yang dia sendiri ikut serta didalamnya.⁵⁶

Dalam kasus pidana dimana alat bukti keterangan saksi atau alat bukti lainnya sulit ditemukan maka Jaksa Penuntut Umum, dengan berpedoman pada hukum acara pidana biasanya melakukan pemecahan berkas perkara yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar pembuktian lebih mudah, karena terdakwa dalam salah satu perkara bisa dijadikan sebagai saksi, dan sebaliknya dalam perkara lain yang dipecah tersebut akan berstatus sebagai terdakwa.⁵⁷

Prosedur pemecahan berkas perkara ini terjadi pada saat proses pra-penuntutan yang diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana pada saat penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nantinya penuntut umum akan mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dalam waktu tujuh hari. Dalam hal, menurut penuntut umum merasa perlu dilakukan pemecahan berkas perkara karena memenuhi unsur Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan disertai dengan petunjuk yang harus dilakukan dalam jangka waktu empat belas hari.

Setelah menerima petunjuk dari penuntut umum, nantinya penyidik akan melakukan pemeriksaan yang baru sehingga akan ada dua atau lebih berkas perkara terhadap masing masing tersangka atau terdakwa. Dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung B-69/E/02/1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Menyatakan bahwa saksi mahkota digunakan dalam hal terjadinya penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi

terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.⁵⁸

Di Italia, *Provvedimenti Urgenti in Tema di Lotta Alla Criminalita Organizzata e di Trasparenze e Buon Andamento Dell'attivit Amministrativa* Bagian 8 Ayat 1 DL 152/1991 Tanggal 13 Maret 1991 (Undang-Undang tentang Saksi Mahkota) bisa diterapkan karena terjadi perubahan asas legalitas dalam konstitusi Italia, dimana pada tahun 1989, Italia berhasil mengukuhkan *Codeci di Procedura Penale* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru Italia). Perubahan hukum acara di Italia juga menyebabkan beralihnya sistem hukum acara dari sistem inquisitur atau *non-adversarial system* ke sistem akuisatur atau *adversarial system*.⁵⁹

Undang-Undang tentang Saksi Mahkota di Italia mempunyai kelebihan tersendiri, dimana aturan tersebut mempunyai tujuan kerjasama antara penegak hukum dan terdakwa yang jelas. Tujuan kerjasama tersebut lebih mengutamakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam aturan tersebut, terdapat suatu prosedur yang bertujuan untuk mengukur keabsahan dari keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota, yang dinamakan prosedur *contra reum*.

Aturan tersebut juga memiliki keunggulan dalam hal pemberian program perlindungan tidak hanya bagi saksi mahkota, tetapi juga keluarga dan kerabat dari saksi mahkota, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi saksi mahkota dan juga membuat saksi mahkota dapat memberikan keterangan dipersidangan tanpa ada tekanan.

⁵⁸ Surat Edaran Kejaksaan Agung B-69/E/02/1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

⁵⁹ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice and Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 131.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 271.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 64.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas, penulis berkesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan saksi mahkota di Indonesia tidak melanggar asas *non-self incrimination* karena asas *non-self incrimination* sendiri merupakan sebuah jaminan, yang diberikan oleh Pasal 14 Ayat (3) *International Covenant On Civil And Political Right* yang menyatakan agar seseorang yang menghadapi proses hukum tidak dianggap atau diperlakukan sebagai orang yang bersalah sampai kesalahannya terbukti menurut hukum maka ketentuan tersebut memberikan beberapa jaminan kepada orang tersebut (tersangka atau terdakwa), salah satunya untuk tidak dipaksa bersaksi atas dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah. Itu artinya, ketentuan tersebut merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa bukan hak seorang saksi. Saksi mahkota yang dikenal di Indonesia berasal kewenangan yang dimiliki penuntut umum untuk melakukan pemecahan berkas perkara yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, kewenangan yang dimiliki penuntut umum ini memiliki kelemahan dalam hal, masih kurang menjamin kepastian hukum dari sisi pemberian keringanan hukuman dan juga seringkali kesaksian yang diberikan saksi mahkota dijadikan dasar bagi penuntut umum untuk menjerat saksi dengan Pasal 242 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal, peran saksi mahkota sangat membantu penuntut umum untuk mengungkap suatu peristiwa pidana.
2. Pengaturan Ideal Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dengan melihat pengaturan di beberapa negara yang telah terlebih dahulu menerapkan aturan ini seperti sistem *plea bargaining* bisa diterapkan di Amerika Serikat karena tujuan dari

prosedur *plea bargaining* adalah untuk efisiensi penanganan perkara. Hal ini sejalan dengan tujuan dari *crime control model* yang ditujukan pada efisiensi, maksudnya ialah meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses suatu tindak pidana. Di Italia, *Provvedimenti Urgenti in Tema di Lotta Alla Criminalita Organizzata e di Trasparenze e Buon Andamento Dell'attivit Amministrativa* Bagian 8 Ayat 1 DL 152/1991 Tanggal 13 Maret 1991 (Undang-Undang tentang Saksi Mahkota) bisa diterapkan karena terjadi perubahan asas legalitas dalam konstitusi Italia, dimana pada tahun 1989, Italia berhasil mengukuhkan *Codeci di Procedura Penale* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru Italia) sehingga saksi mahkota dapat digunakan untuk membantu penuntut umum dalam mengungkap suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Walaupun penulis menyatakan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana dibenarkan, karena saksi mahkota yang ada di Indonesia berasal dari kewenangan penuntut umum melakukan pemecahan berkas perkara yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi ketentuan tersebut masih memiliki kekurangan dalam hal memberikan keringanan hukuman atas status sebagai tersangka dan juga seringkali status tersebut digunakan penuntut umum untuk memberikan pertanyaan yang menjerat kepada terdakwa sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan ini didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.
2. Terkait dengan pengaturan ideal saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia, setiap negara memang mempunyai nilai idealnya suatu aturan masing-masing, karena masing-masing negara juga memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, tetapi perbedaan ini tidak

juga dapat dijadikan alasan bahwa aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Penulis berharap agar pengaturan saksi mahkota yang baru memberikan keringanan hukuman pada saksi mahkota. Kemudian perlu dibuatnya suatu prosedur nantinya bertujuan untuk mengukur keabsahan dari keterangan yang diberikan saksi mahkota. Jika keterangan yang diberikan saksi mahkota dipandang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam sidangnya sebagai terdakwa maka keterangan tersebut tidak dijadikan dasar untuk mendakwa terdakwa karena telah memberikan keterangan palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Seno Indriyanto. 2010, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Albert, Rumokoy Donald Dan Frans Maramis. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Alfitra. 2018, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asas Sukses, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakannya Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Arif, Fakrulloh Zudan. 2011, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asnawi, M. Natsir. 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Bisri, Ilhami. 2013, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.

Effendi, Tolib. 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Sistem Peradilan Pidana diberbagai Negara*, Pustaka Yustisia, Surabaya.

Harahap, M. Yahya. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, O.S Eddie. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ishaq. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mahmud, Peter Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Pangaribuan, M.A Aristo, Arsa Mutfi, dan Ichsan Zikry. 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Praja, S.H Juhaya. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Renggong, Ruslan. 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Sadjijono, H dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi POLRI dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang, Surabaya.
- Said, Is Muhammad. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Samosir, C. Djisman. 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Permasiyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- _____. 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiadi, Edi dan Kristin. 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Bandung.
- Siahaan, Maruarar. 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siahaan, Monang. 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Soedirjo. 2008, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soetarna, Herdar. 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Surabaya.
- Sofyan, Muhammad Andi dan Abdul Asis. 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar.
- Subekti, Raden. 2005, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tutik, Triwulan Titik. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali. 2017, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL/KAMUS/MAKALAH

Andrews, A. John. "European Law Review: Labita Vs Italy", *Westlaw Journal*, Volume 3, No. 5, 2018.

Erdiansyah. "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, 2010.

Kennedy, Anthony. "Justifying The Civil Recovery of Criminal Proceed", *Westlaw Journal*, Volume 4, No. 7, 2018.

Lengbein, H. John. "Understanding The Short History of Plea Bergaining", *Westlaw Journal*, Yale Law School, Volume 4, No. 2, 2009.

Mitsilegas, Valsamis. "Defining Organised Crime In the European Union: The Limit of European Criminal Law in An Area Of Freedom, Security, And Justice", *Westlaw Journal*, Volume 6, No. 4, 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Rees, Tom. "Change of Plea to Guilty: Made After Judge's Comment to Counsel In Chambers", *Westlaw*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2012 Tentang Kasus Pengerusakan Kantor Bupati Aceh Singkil.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/PUU-VII/2010.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

D. INTERNET

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses tanggal 28 Februari 2018.

<http://www.kbbi.web.id/ideal>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

<http://www.business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya>, diakses tanggal 30 April 2019.